

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Jakarta

## Penonaktifan NIK Kurangi Beban Ekonomi

JAKARTA - Penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang berdomisili luar Jakarta dapat mengurangi beban ekonomi DKI. Pengamat tata kota Yayat Supriatna menilai, banyak warga Jakarta yang kini sudah tinggal di kota-kota penyangga, seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek) namun masih menikmati fasilitas yang diberikan Pemerintah Provinsi Jakarta.

"Kalau jadi daerah khusus, beban ekonomi bisa berkurang. Ini utamanya terkait jasa, fasilitas bansos, pendidikan hingga kesehatan," jelasnya.

Menurutnya, fasilitas tersebut angkanya hampir 18 triliun. Saat ini dari 12 juta penduduk Jakarta, hanya sembilan juta yang benar-benar menetap di Jakarta. Sedangkan sisanya sebanyak sudah tinggal di luar Jakarta sebagai komuter.

Sejak tahun 1990-an, warga Jakarta mulai berpindah ke kota-kota penyangga, seperti Bodetabek karena rumah semakin sulit didapat dan harga tanah semakin mahal.

Selain itu, Jakarta merupakan kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Maka, Yayat mengapresiasi kebijakan penonaktifan NIK warga Jakarta yang diajukan Pemerintah Provinsi ke Kementerian Dalam Negeri.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/7256/SJ tanggal 27 Desember 2021 tentang Pindah Datang Penduduk mengamanatkan bahwa warga yang sudah berdomisili lebih dari setahun harus mengurus kepindahannya. Penghapusan NIK warga yang tidak lagi tinggal di Jakarta dinilai bermanfaat untuk jangka panjang.

Hal itu karena dokumen warga Jakarta dan data pemilihan pilkada menjadi lebih akurat serta penyaluran bantuan sosial (bansos) bisa tepat sasaran. ■ **Ant/G-1**